

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ONE KRISNATA.....

Sebagai Calon Bupati/~~Wakil Bupati~~*) Klaten Tahun 2020

Memberikan kuasa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara (LHKPN) hasil penelitian dan/atau klarifikasi dari Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) kepada masyarakat.

Demikian surat kuasa ini kami sampaikan, untuk menjadikan maklum.

Klaten, 28 - 10 -.....2020

Pemberi Kuasa

(ONE KRISNATA.....)

*) coret salah satu.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 September 2020/Khusus - Calon PN)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SUB UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ONE KRISNATA
2. Jabatan : CALON BUPATI
3. NHK : 207854

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 10.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m²/120 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1198 m²/700 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 493 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 305 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah Seluas 2000 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
6. Tanah Seluas 1719 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 450.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2009, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2002, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.750.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.462.099.474

F. HARTA LAINNYA Rp. ---



Sub Total	Rp.	21.462.099.474
III. HUTANG	Rp.	1.750.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.712.099.474

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.